



## TINDAK LANJUT PEMBATALAN KENAIKAN IUR BPJS

# Tunggu Aturan Teknis, Kaji Serapan Anggaran

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya memilih mengkaji serapan anggaran untuk pembayaran iur BPJS Kesehatan. Langkah itu menyusul kebijakan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iur BPJS Kesehatan. Sehingga ketika sudah ada aturan teknis dari pemerintah, maka Pemkot bisa langsung menindaklanjutinya.

"Apakah keputusan itu membatalkan iur sejak Januari atau berlaku ketika keputusan ditetapkan. Maka kami juga perlu mengkaji terlebih dahulu bagaimana serapannya selama ini," ungkap Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogya Kadri Renggono, Minggu (15/3).

Aturan teknis yang dimaksud ialah juknis dan juklak dari Kementerian Keuangan terkait keputusan MA. Alokasi anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Yogya untuk iur BPJS Kesehatan bagi masyarakat juga terbilang besar, sekitar Rp 60 miliar. Terutama bagi peserta kategori peneri-

ma bantuan iur maupun program peserta dibiayai pemerintah daerah (PDPD).

Kadri menambahkan, jika keputusan tersebut berlaku saat diputuskan, maka apakah memungkinkan untuk menarik anggaran yang sudah dialokasikan atau ada pilihan lain. Misalnya meningkatkan jenis layanan kesehatan yang bisa diakses masyarakat dengan menggunakan BPJS Kesehatan tanpa menarik alokasi anggaran. "Kami akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk legislatif mengenai berbagai kemungkinan tersebut. Sehingga masyarakat Kota Yogya yang

membutuhkan layanan kesehatan tetap bisa mengakses dengan baik," urainya.

Sementara itu, Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengatakan masih perlu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia berharap keputusan MA untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya diperoleh masyarakat. "Baik itu ada keputusan pembatalan atau tidak, yang penting bagi masyarakat adalah pelayanan. Harapan kami, pembatalan tidak mengurangi pelayanan kesehatan," harapnya.

Heroe mengaku, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut setidaknya dapat menurunkan beban masyarakat sekaligus pemerintah daerah. Hal ini karena alokasi anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan memiliki porsi yang cukup besar di APBD Kota Yogya. **(Dhi)-o**

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 28 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005